

## Obligasi dan Inovasi Daerah

*Obligasi Daerah seharusnya tidak membuat pemerintah daerah terjebak paradigma pembiayaan hanya untuk infrastruktur yang berbayar, tetapi dapat mengembangkan berbagai fasilitas publik yang memiliki nilai tambah dan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai investor agar dapat turut menikmati fasilitas tersebut.*

Tersendatnya berbagai program strategis daerah karena kurangnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi permasalahan di era otonomi daerah. Daerah harus memaksa diri mencari pendanaan untuk menjalankan proyek strategis.

Wacana Obligasi Daerah (Obda) sudah lama digulirkan sebagai salah satu alternatif pendanaan proyek strategis daerah, dan mencuat kembali pasca keluarnya tiga Peraturan Menteri Keuangan (POJK) diakhir tahun 2017. Adanya regulasi tersebut menjadi "cahaya baru" bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendapatkan arahan yang lebih jelas dan mudah untuk dapat menerbitkan Obda. Selain itu, Obda bisa menjadi penawaran yang cukup menarik bagi investor sebagai instrumen baru dalam berinvestasi.

### Persiapan Obligasi Daerah

Pertama, Pemda wajib mendapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan memenuhi *Debt Service Coverage Ratio* minimal 2,5.

Kedua, perlu dibentuk tim khusus. Tim ini tidak harus berasal dari kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemda dapat bekerja sama dengan

pihak lain yang kompeten dalam mempersiapkan rencana dan berbagai jenis strategi Obda, termasuk mengawasi detail persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tim ini menjadi motor penggerak untuk meningkatkan kepercayaan dari calon investor untuk mendapatkan pendanaan.

Ketiga adalah peran pemerintah pusat dalam mengawasi setiap daerah yang akan menerbitkan Obda. Pemerintah pusat tidak akan menjamin Obda, tetapi perlu diperhatikan gagal bayar selalu saja bisa membayangi setiap investor. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2016 dari seluruh total potensi kerugian daerah, 55% karena belum dilakukan pelunasan kepada rekanan. Tentu ini perlu menjadi catatan bahwa ketika menerbitkan Obda, Pemda harus tertib melunasi pembayaran kupon kepada investor.

Keempat, Pemda harus memilih dengan matang proyek yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat Obda diharuskan untuk mendanai proyek strategis yang memiliki pengembalian, Pemda harus lebih kreatif dan inovatif dalam menentukan jenis proyek. Misalnya, daerah di pinggir pantai mungkin harus lebih

memprioritaskan pembangunan infrastruktur wisata bahari dan perikanan & kelautan, dibandingkan jalan tol.

### Inovasi Proyek Strategis

Penting bagi Pemda untuk tidak terjebak pada euforia untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga. Paradigma yang harus dibangun adalah bagaimana menciptakan ruang inovasi untuk mendapatkan proyek yang paling bermanfaat bagi rakyat.

Pemda perlu memilih dengan tepat berbagai macam kebutuhan dan inovasi proyek tertentu yang akan didanai. Banyak pilihan proyek strategis yang dapat didanai untuk kebutuhan masyarakat, dan masyarakat perlu dibangun kesadarannya agar berpartisipasi dengan menjadi investor untuk mendapatkan fasilitas yang akan diperoleh. Berdasarkan studi di Amerika yang dikeluarkan oleh *Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB)*, 43% investor Obda adalah masyarakat (ritel).

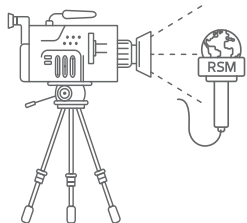
Pembangunan Indonesia dimulai dari inovasi pembangunan yang dilakukan di daerah-daerah, dengan itu Obda menjadi sebuah jalan baru untuk menciptakan inovasi proyek strategis bagi seluruh daerah di Indonesia.



**Humbul Kristiawan**  
humbul.kristiawan@rsm.id

## KEY POINTS

- Pemda perlu memastikan kesiapan dan memiliki rencana komprehensif yang mencakup keseluruhan aktifitas dari pra dan pasca penerbitan.
- Kerja sama dengan pihak lain dapat mendukung konsistensi pelaksanaan.
- Inovasi proyek strategis harus dilakukan Pemda agar tidak terjebak pembuatan proyek strategis yang tidak tepat guna.



## THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

RSM Indonesia

Wake Up Call adalah kolom yang dikhususkan untuk membahas topik terkait audit, akuntansi, perpajakan, keuangan, manajemen risiko, tata kelola, audit internal, pengendalian internal, teknologi informasi dan konsultasi manajemen lainnya. RSM Indonesia adalah anggota dari RSM, network kantor akuntan publik dan konsultan terbesar ke-6 di dunia. RSM hadir di lebih dari 120 negara dengan 800 kantor, didukung oleh 43.000 staff dengan lebih dari 3.000 partner. Pertanyaan dapat ditujukan ke [wakeupcall@rsm.id](mailto:wakeupcall@rsm.id).